

Nama : Yogi Rohani

NPM : 2313031031

CASE STUDY 2

Pemerintah Provinsi Nusantara menerapkan sistem e-Government bernama "IzinCerdas" untuk memproses seluruh jenis perizinan usaha dan bangunan secara daring. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi. Namun, laporan Ombudsman menyebutkan bahwa:

- Terjadi keterlambatan rata-rata 10 hari dalam penerbitan izin.
- Banyak izin yang tidak jelas statusnya dalam sistem.
- Ditemukan praktik penyalahgunaan wewenang meskipun sistem digital sudah diterapkan.

Pertanyaan:

Tunjukkan bagaimana Anda akan menyusun audit kinerja berbasis risiko untuk mengevaluasi sistem IzinCerdas, serta bagaimana Anda dapat menggunakan teknologi digital dalam mendeteksi potensi penyimpangan dan kelemahan sistem.

Jawaban:

Audit kinerja berbasis risiko terhadap sistem e-Government IzinCerdas disusun dengan menempatkan risiko sebagai dasar utama penentuan fokus audit. Sistem ini dirancang untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi perizinan, sehingga audit diarahkan untuk menilai apakah tujuan tersebut telah tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pendekatan berbasis risiko memungkinkan auditor memprioritaskan area yang paling rentan menimbulkan kegagalan layanan, penyimpangan, maupun penyalahgunaan wewenang, khususnya pada proses yang sepenuhnya bergantung pada sistem digital.

1. Identifikasi Risiko Utama dalam Sistem IzinCerdas

Tahap awal audit dimulai dengan mengidentifikasi risiko-risiko utama yang muncul dalam implementasi sistem IzinCerdas. Keterlambatan rata-rata penerbitan izin selama sepuluh hari menunjukkan adanya risiko inefisiensi proses, baik yang bersumber dari desain sistem maupun dari intervensi manusia. Ketidakjelasan status izin dalam sistem mengindikasikan risiko lemahnya keandalan informasi dan transparansi layanan publik. Selain itu, masih

ditemukannya praktik penyalahgunaan wewenang meskipun sistem telah terdigitalisasi mencerminkan risiko tata kelola dan pengendalian internal yang belum memadai, terutama pada aspek pengawasan dan akuntabilitas penggunaan internal sistem.

2. Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko

Dalam pelaksanaan audit, auditor mengevaluasi kinerja sistem dengan menelusuri kesesuaian antara standar pelayanan yang ditetapkan dengan realisasi di lapangan. Proses audit difokuskan pada analisis alur perizinan dari tahap pengajuan hingga penerbitan izin, untuk mengidentifikasi titik-titik hambatan yang menyebabkan keterlambatan. Auditor juga menilai konsistensi dan keandalan informasi status izin yang ditampilkan kepada masyarakat, dengan membandingkan data yang diakses publik dan data yang dikelola oleh administrator. Selain itu, auditor menelaah pengendalian internal, termasuk pemisahan fungsi, otorisasi, dan kepatuhan terhadap prosedur operasional standar, guna memastikan tidak adanya celah yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan dalam sistem digital.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Mendeteksi Penyimpangan

Teknologi digital dimanfaatkan oleh auditor sebagai alat bantu utama dalam mendeteksi potensi penyimpangan dan kelemahan sistem. Melalui analisis data secara menyeluruh, auditor dapat mengidentifikasi pola keterlambatan yang bersifat sistematis serta izin-izin yang mengalami stagnasi tanpa kejelasan status. Audit trail dan log aktivitas pengguna dianalisis untuk menelusuri setiap perubahan data dan keputusan yang dilakukan dalam sistem, sehingga dapat diketahui apakah terdapat intervensi manual yang tidak sah. Selain itu, penggunaan teknik analitik lanjutan memungkinkan auditor mendeteksi perilaku tidak wajar, seperti akun tertentu yang sering mempercepat proses izin atau aktivitas sistem yang terjadi di luar jam operasional normal.

4. Peran Audit dalam Perbaikan Tata Kelola e-Government

Hasil audit kinerja berbasis risiko tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan, tetapi juga menjadi dasar perbaikan tata kelola sistem e-Government. Melalui temuan audit, pemerintah daerah dapat memperbaiki desain sistem, memperkuat pengendalian internal, dan meningkatkan transparansi layanan publik. Dengan demikian, sistem IzinCerdas diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat digitalisasi administrasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.